



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : PLN KANTOR PUSAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TRI HARDIMASYAR
2. Jabatan : VICE PRESIDENT INOVASI TEKNOLOGI DAN INKUBASI BISNIS KORPORAT
3. NHK : 198119

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **4.000.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 125 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
2. Tanah Seluas 249 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI
Rp. 1.100.000.000
3. Tanah Seluas 4039 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI
Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **1.371.500.000**

1. MOTOR, HONDA REVO SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL
SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, HONDA BRV PRESTIGE Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
170.000.000
3. MOBIL, TOYOTA SEDAN ALTIS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
120.000.000
4. MOTOR, GESITS G1 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
5. MOBIL, CHERY TIGGO 8 PROMAX AWD Tahun 2024, HASIL
SENDIRI Rp. 628.500.000
6. MOBIL, MG ZS EV Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 413.000.000
7. MOTOR, UWINFLY T5 Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **287.977.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	2.050.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.985.561.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	220.000.000
Sub Total	Rp.	10.915.038.000
III. HUTANG	Rp.	425.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	10.490.038.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.